

Judul : Putus akses dengan Grok, Komdigi dapat acungan jempol
Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Putus Akses Grok Komdigi Dapat Acungan Jempol

LANGKAH Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memutus sementara akses aplikasi Grok mendapat dukungan dari DPR. Kebijakan tersebut dinilai sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan teknologi kecerdasan artifisial (AI), khususnya di ruang digital.

Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menilai, maraknya konten pornografi palsu berbasis AI, terutama *deepfake* seksual nonkonsensual, telah menjadi ancaman serius bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Karena itu, ia mengapresiasi langkah tegas Komdigi dalam mencegah dampak yang lebih luas.

"*Deepfake* seksual bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi sudah masuk ke ranah pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan berbasis gender di ruang digital," ujar Nurul di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Menurutnya, pemutusan akses sementara terhadap aplikasi yang terintegrasi dengan media sosial X tersebut merupakan langkah proporsional dan sesuai kewenangan pemerintah. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Regulasi tersebut, lanjut Nurul, mewajibkan setiap platform digital memastikan teknologinya tidak memfasilitasi konten terlarang. Jika terdapat indikasi kuat potensi penyalahgunaan yang membahayakan publik, negara tidak boleh ragu untuk bertindak.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, platform digital global yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum nasional serta menjunjung nilai perlindungan masyarakat. Inovasi teknologi, menurutnya, harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial.

"Platform internasional se-

perti X dan produk turunannya wajib menghormati hukum Indonesia serta menjamin perlindungan pengguna, bukan justru membuka celah terjadinya kejahatan digital," ucapnya.

Nurul juga mendorong agar klarifikasi yang diminta pemerintah kepada pihak X dilakukan secara terbuka dan disertai komitmen nyata. Komitmen tersebut mencakup penguatan sistem pengamanan, moderasi konten, serta mekanisme pencegahan penyalahgunaan AI.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan literasi digital dan percepatan pembuatan regulasi agar Indonesia tidak selalu bersikap reaktif, melainkan siap menghadapi laju perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Dukungan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta. Ia menilai, pemblokiran sementara Grok sebagai langkah penting dalam melindungi ruang digital nasional. Menurutnya, fitur Grok harus segera melakukan perbaikan sistem, termasuk penerapan kewajiban moderasi konten sebelum dapat diunduh atau disebarluaskan.

Legislator Fraksi PKS itu juga mendukung langkah hukum terhadap pihak yang menyalahgunakan teknologi tersebut untuk kepentingan negatif. Platform X kudu bertanggung jawab penuh dalam mencegah peredaran konten pornografi yang masih ditemukan di layanannya.

Meski fitur Grok telah dibatasi hanya untuk pelanggan berbayar, Sukamta menilai, kebijakan tersebut belum memadai. Pembatasan dan penyaringan konten negatif seharusnya berlaku bagi seluruh pengguna tanpa pengecualian.

"Filter harus dibuat sangat ketat agar tidak ada ruang bagi siapa pun, baik pengguna berbayar maupun tidak, untuk menghasilkan konten negatif," ujarnya. ■ PYB